

ABSTRAK

EKSISTENSI PERAN LEMBAGA MAJELIS ADAT ACEH DALAM PENERAPAN KEARIFAN LOKAL UNTUK PENYELESAIAN *RESTORATIF JUSTICE* TERHADAP TINDAK PIDANA (STUDY PENELITIAN QANUN NOMOR 9 TAHUN 2008)

Syaiful Bahri*

Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki kekayaan budaya dan kearifan lokal yang sangat kuat. Salah satu lembaga adat yang berperan penting dalam masyarakat Aceh adalah Majelis Adat Aceh. Lembaga ini memiliki tugas dan wewenang dalam melestarikan dan menerapkan nilai-nilai kearifan lokal, termasuk dalam penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan *restorative justice*. Namun, dalam praktiknya, peran Majelis Adat Aceh dalam penerapan kearifan lokal untuk penyelesaian *restorative justice* terhadap tindak pidana masih lemah dan belum optimal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan dari lembaga Majelis Adat Aceh (MAA) dalam penerapan kearifan lokal untuk penyelesaian *restorative justice* terhadap tindak yang diatur dalam qanun nomor 9 tahun 2008, kelemahan dari lembaga Majelis Adat Aceh (MAA) dalam penerapan kearifan lokal untuk penyelesaian *restorative justice* terhadap tindak pidana, serta cara mengatasi kelemahan dari lembaga Majelis Adat Aceh (MAA) dalam penerapan kearifan lokal untuk penyelesaian *restorative justice* terhadap tindak yang diatur dalam qanun nomor 9 tahun 2008.

Penelitian ini, menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Pendekatan deskriptif adalah pendekatan yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan, dan lain-lain, dan hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Majelis Adat Aceh berperan penting dalam menerapkan kearifan lokal untuk penyelesaian *restorative justice* terhadap tindak pidana sebagai mediator dan penjaga nilai-nilai tradisional Aceh. Namun, terdapat kelemahan seperti keterbatasan perlindungan HAM, kurangnya kesetaraan gender, minimnya keterlibatan masyarakat, keterbatasan kapasitas, dan kurangnya standar yang jelas. Untuk mengatasinya, diperlukan pelibatan pemangku kepentingan lokal, pelatihan bagi anggota majelis, serta transparansi dan akuntabilitas dalam proses *restorative justice*.

Kata Kunci: Majelis Adat Aceh, Restoratif Justice, Kearifan Lokal

*Mahasiswa Program Pascasarjana Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

ABSTRACT

THE EXISTENCE OF THE ROLE OF THE ACEH CUSTOMARY COUNCIL INSTITUTION IN THE APPLICATION OF LOCAL WISDOM FOR RESTORATIVE JUSTICE SETTLEMENT OF CRIMINAL OFFENSES (RESEARCH STUDY OF QANUN NUMBER 9 OF 2008)

Syaiful Bahri*

Aceh is one of the provinces in Indonesia that has a very strong cultural wealth and local wisdom. One of the customary institutions that plays an important role in Aceh society is the Aceh Customary Council. This institution has the duty and authority to preserve and apply the values of local wisdom, including in the settlement of criminal offenses through a restorative justice approach. However, in practice, the role of the Aceh Customary Council in the application of local wisdom for restorative justice settlement of criminal offenses is still weak and not optimal.

This study aims to determine the role of the Aceh Customary Council (MAA) in the application of local wisdom for restorative justice settlement of crimes regulated in qanun number 9 of 2008, the weaknesses of the Aceh Customary Council (MAA) in the application of local wisdom for restorative justice settlement of crimes, and how to overcome the weaknesses of the Aceh Customary Council (MAA) in the application of local wisdom for restorative justice settlement of crimes regulated in qanun number 9 of 2008.

This research uses a descriptive analysis approach. The descriptive approach is an approach intended to investigate circumstances, conditions, situations, events, activities, etc., and the results are presented in the form of a research report.

The results showed that: Aceh Customary Council plays an important role in applying local wisdom for restorative justice settlement of criminal offenses as a mediator and guardian of Acehnese traditional values. However, there are weaknesses such as limited human rights protection, lack of gender equality, lack of community involvement, limited capacity, and lack of clear standards. Overcoming these weaknesses requires the involvement of local stakeholders, training for tribunal members, and transparency and accountability in the restorative justice process.

Keywords: Aceh Customary Council, Restorative Justice, Local Wisdom

**Students of the Postgraduate Program in the Law Program at the Islamic University of North Sumatra.*